



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

**KPU KABUPATEN GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

JL. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO NOMOR 690 GRESIK  
Telp. (031) 3954513 - 3958968 Fax. (031) 3954534

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Penyusunan LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta Acuan yang dipakai merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

*Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dari semua elemen, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pelaksanaannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 menggambarkan kualitas kinerja KPU sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Adapun hasil reviu atas SAKIP tahun 2018 yang disusun KPU Kabupaten Gresik mendapatkan nilai CC.

Semoga dengan disusunnya LAKIP ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan, dan solusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU.

**GRESIK, 27 JANUARI 2022**  
**KETUA KPU KAB. GRESIK**



**AKHMAD RONI**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan integritas yang tinggi dari para pelaksana untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan hasil akhir dalam pesta demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bisa terwujud.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini dapat juga disebut dengan paradigma *Good Governance (GG)* yaitu menciptakan hubungan antara Negara dan warga Negara yang terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis.

Salah satu karakteristik yang penting dalam konsep *Good Governance* adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat tersebut. Ketentuan ini merupakan kewajiban setiap instansi Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setelah berakhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik Tahun 2021 yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media

akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dari dana DIPA Bagian Anggaran 076 maupun anggaran hibah pemilihan tahun 2020 yang dilaksanakan tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 6.794.445.000,-dengan rincian anggaran APBN tahun 2021 sebesar Rp. 3.840.090.312 dan anggaran hibah pemilihan tahun 2020 sebesar Rp. 2.954.354.688. Adapun penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang tertuang dalam 2 program dan 17 Kegiatan, yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen :

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)
2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
4. Menyelenggarakan pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Gresik;
5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Gresik;
8. Melaksanakan evaluasi dan reuiu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Gresik;
9. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
10. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Gresik; dan
11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Gresik secara optimal.

## II. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Gresik, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Gresik);
2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
5. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Gresik, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Tugas dan Fungsi .....	3
D. Struktur Organisasi .....	6
E. Sistematika Penyajian .....	8
BAB II .....	10
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	10
A. Rencana Strategis .....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	24
BAB III .....	31
AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	31
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja .....	31
C. Akuntabilitas Keuangan .....	51
BAB IV .....	51
PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

### Lampiran

1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gresik Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gresik Tahun 2021
3. Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2021
4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media untuk mengeksplorasi dari mana dan sampai sejauh mana organisasi bergerak sesuai dengan Renstra dan tuntutan perubahan masyarakat. Beberapa produk ketentuan baik yang secara tegas maupun secara tersirat menguatkan alasan mengapa KPU Kabupaten Gresik wajib memenuhi penyusunan LAKIP adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah);
8. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
10. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
11. Keputusan KPU Nomor 197/ PR.01.3-Kpt/01/KPU /IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
12. Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 1592/HK.03.1.Kpt/3525/KPU - Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

15. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tanggal 25 Maret 2003.
16. Surat Edaran Sekjen KPU RI Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Gresik Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2021. Pada tahun anggaran 2021, KPU Kabupaten Gresik memiliki anggaran besar untuk melaksanakan tahapan dan kegiatan rutin dan pemilihan serentak tahun 2021.

Tujuan dari penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Gresik selama tahun 2021, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun 2022.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten/Kota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas, maka Ketua KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris jenderal KPU, dibantu oleh seorang wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU kabupaten/Kota terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan di bawahnya adalah staf.

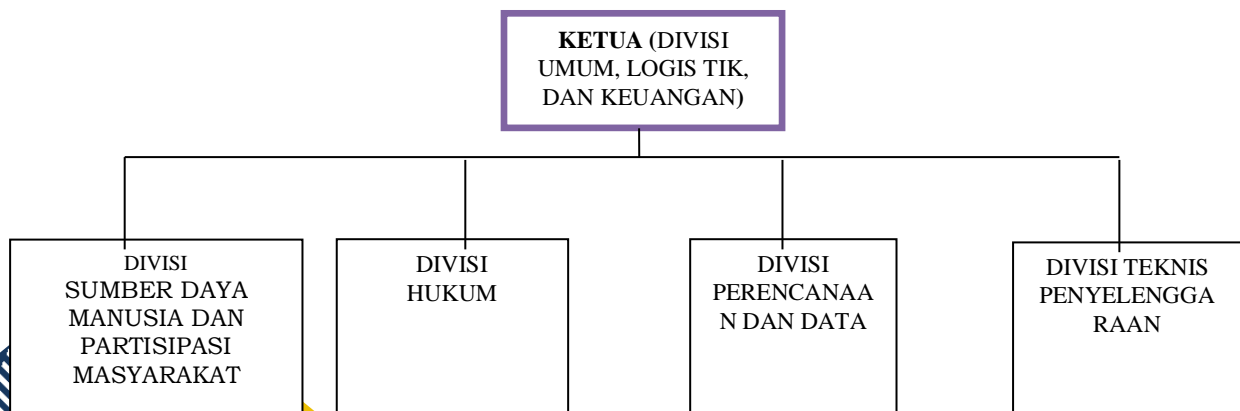
#### D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Gresik dilakukan pembagian tugas. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, tanggal 10 Agustus 2016, Nomor : 30/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2016 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Gresik nomor 52/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2014 tentang Pembentukan Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang terdiri dari:

- a) Ketua KPU Kabupaten Gresik sekaligus Divisi Umum, Logistik, dan Keuangan: Akhmad Roni, S.Si
- b) Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat : Makmun, S.Th.I
- c) Divisi Hukum : Kholyatul Mudznibah, S.Pd
- d) Divisi Perencanaan dan Data : Abdullah Sidiq Notonegoro, S.Ag
- e) Divisi Teknis Penyelenggaraan: Elvita Yuliati, SP

Adapun bagan organisasi KPU Provinsi Jawa Timur yang dibagi dalam 5 (empat) divisi dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini

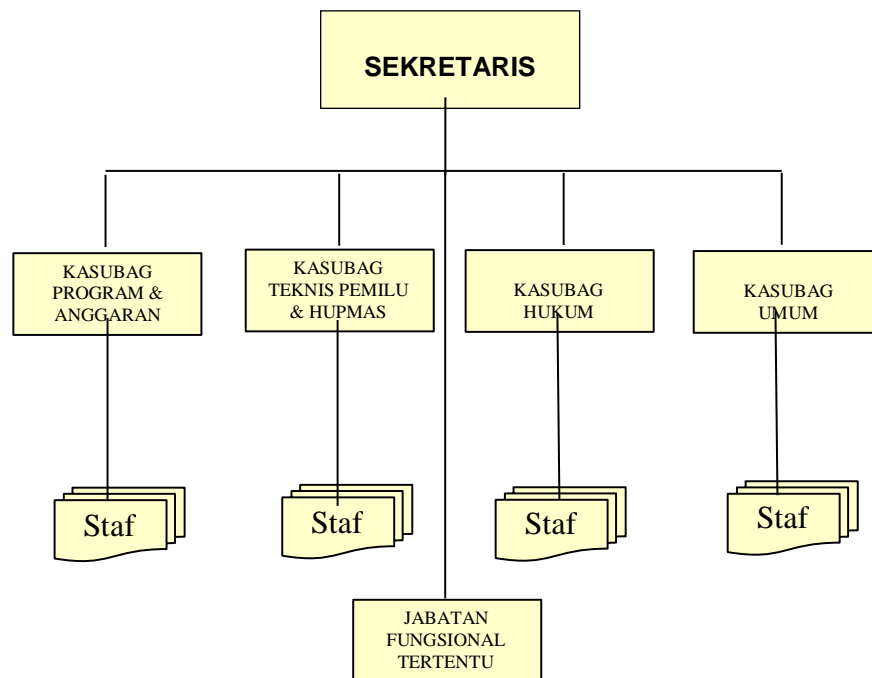
#### Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gresik



Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Gresik pada tahun 2021 adalah 31 orang yang terdiri dari 11 orang PNS Organik, 2 orang PNS Dpk, 8 orang tenaga kontrak dan 10 tenaga pendukung.

Adapun bagan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK**



Berikut adalah susunan kepegawaian dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik:

Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sampai dengan bulan Desember 2021:

No	Uraian	Jumlah				Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
1.	PNS	1	7	4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang PNS Organik (Gol IV)</li> <li>• 7 orang PNS Organik (Gol III)</li> <li>• 4 orang PNS Organik (Gol II)</li> </ul>

						• 1 orang DPK/PNS Pemda
2.	CPNS	-	2	-	-	2 orang CPNS (Gol III)
3.	Pramu bakti		3			Biaya APBN
4.	Satpam		3			Biaya APBN
5.	Sopir		2			Biaya APBN
6.	Tenaga Pendukung		1			Biaya APBN
TOTAL			23			

### E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kabupaten Gresik serta sistematika penyajian.

#### **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Kabupaten Gresik Tahun 2021.

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2021 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

## **BAB IV Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi Organisasi

Sebagai lembaga vertikal yang menganut sistem hirarkis, visi dan misi KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan visi dan misi KPU RI. Adapun visinya menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Gresik periode 2020-2024 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Gresik bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

#### 2. Misi Organisasi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kabupaten Gresik selama kurun waktu 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Gresik periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Gresik yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **3. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Gresik, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Gresik yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam Renstra KPU Kabupaten Gresik tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Gresik yaitu :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Gresik yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif., dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang

dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik pada kurun waktu 2020-2024 meliputi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

1. **Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :**

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyelenggarakan pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Gresik;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Gresik;
- h. Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Gresik;
- i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Gresik; dan
- k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Gresik secara optimal.

**2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :**

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Indikator sasaran strategis KPU Kabupaten Gresik disajikan dalam tabel di bawah ini :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0.17 %	0.16%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							

	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagaimana dijadikan dasar untuk menyusun perjanjian kinerja disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi</b>							

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	374 badan adhok	374 badan adhok	374 badan adhok
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%	88%	88%	88%	88%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</b>							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	2 perkara	2 perkara
		Jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	2 perkara	2 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	89%	90%
<b>2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							

	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Jumlah Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	511 calon legislatif	511 calon legislatif
<b>3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	60%	70%	80%	90%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	-	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	-	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	-	90%	95%	98%	100%

		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	-	-	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder	-	-	100%	100%	100%
<b>4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	100%	100%

	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	100%	100%	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	100%	100%
<b>5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

### E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Selama ini istilah Penetapan Kinerja (TAPKIN) akan berubah menjadi Perjanjian Kinerja (PK), yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekretariat KPU.

Selama ini Penetapan Kinerja difokuskan menjadi tugas Sekretariat KPU saja, namun mulai tahun 2016, secara khusus KPU (disebut Komisioner) juga harus menetapkan perjanjian kinerja/penetapan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga. Dalam dokumen renstra, sasaran strategis KPU terdiri dari : 4 (empat) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama, sebagaimana berikut :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							

	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0.17 %	0.16%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	89%	89%	90%

Sedangkan di lingkungan KPU Kabupaten Gresik, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, masing-masing untuk KPU Kabupaten Gresik dan Sekretariat KPU Kabupaten Gresik telah menetapkan sasaran program/kegiatan dan indikator sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gresik mempunyai 6 sasaran program dengan 7 indikator;
2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gresik mempunyai 19 sasaran kegiatan dengan 28 indikator;

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi</b>							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib,	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	efektif dan efisien						
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan	88%	88%	88%	88%	88%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Kearsipan					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi mendukung pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</b>							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat,	90%	92%	93%	94%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		tepat dan akurat sesuai dengan SOP						
<b>2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>								
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
<b>3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>								
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	60%	70%	80%	90%	100 %	
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	-	90%	95%	98%	100 %	
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	-	90%	95%	98%	100 %	
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	-	90%	95%	98%	100 %	
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	90%	95%	98%	100 %	
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	100 %	100 %	100 %	
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada	-	-	100 %	100 %	100 %	

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	stakeholder					
<b>4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkhies, kinerja KPU Kabupaten Gresik merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Pusat. Kinerja KPU Kabupaten Gresik Tahun 2021, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU Pusat dan KPU Kabupaten Gresik tahun 2020 – 2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Tahun anggaran 2021, KPU Kabupaten Gresik menetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU pada tahun 2021 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

#### **B. Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja**

Tahun 2015, merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dalam penyusunan evaluasi kinerja akhir Instansi Pemerintah, karena merupakan tahun transisi/perubahan dari penggunaan Rensta 2015 – 2019 menuju ke

Renstra tahun 2020 – 2024. Pada masa transisi tersebut, KPU Kabupaten/kota diharuskan menyusun renstra. Renstra yang disusun di 2020-2024 masih mengadopsi sasaran strategis maupun indikator kinerja yang lama, Karena dalam penetapan kinerja untuk tahun 2015 harus menggunakan ketentuan yang ada di Renstra KPU tahun 2010 – 2014. Perencanaan kinerja ini berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tetapi dalam perjalanannya berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, sehingga beberapa bentuk penyebutan dan implementasinya akan mengalami perubahan yang signifikan.

KPU menetapkan 6 (enam) indikator kinerja mengadaptasi indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan KPU untuk tahun 2021, mengacu pada Renstra tahun 2020 – 2024 melalui target-target dalam perjanjian kinerja. Indikator kinerja tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya selama tahun 2021, sehingga menghasilkan capaian kinerja tahun 2021.

Tabel A.1. :

Pengukuran Kinerja terhadap IKU tahun 2021

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target %</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Indeks Reformasi Birokrasi	50%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Selama ini istilah Penetapan Kinerja (TAPKIN) akan berubah menjadi Perjanjian Kinerja (PK), yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang

merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekrteriat KPU.

Selama ini Penetapan Kinerja difokuskan menjadi tugas Sekretariat KPU saja, namun mulai tahun 2015, secara khusus KPU (disebut Komisioner) juga harus menetapkan perjanjian kinerja/penetapan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga. Dalam dokumen renstra, sasaran program KPU terdiri dari : 6 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, sebagaimana berikut :

1) Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

Sasaran ini telah ditetapkan dalam Renstra 2020 – 2024, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas SDM KPU yang unggul dan kompeten. Sasaran strategis akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, dengan terinci dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

Tabel A.1. :

Indikator Kinerja berdasarkan Renstra KPU tahun 2020 – 2024 (sasaran strategis 1)

<b>No. (1)</b>	<b>Indikator Kinerja (2)</b>	<b>Target (3)</b>
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%

2) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran strategis ini dimaksud untuk mewujudkan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Gresik yang memadai dan lengkap. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan, dengan berpedoman pada 1 (satu) indikator kinerja, yang meliputi :

Tabel A.2. :

Indikator Kinerja berdasarkan Renstra KPU tahun 2020 – 2024 (sasaran strategis 2)

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%

3) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran strategis dari kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta keuangan KPU Kabupaten Gresik setiap tahunnya. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan, dengan mengacu kepada 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

Tabel A.3. :

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra KPU tahun 2020 – 2024 (sasaran strategis 3)

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
2.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

4) Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Sasaran strategis dari kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemutakhiran data pemilih yang konsisten dan berkelanjutan pasca pemilu/pemilihan terakhir yang dilaksanakan setiap bulan. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Tabel A.4. :

Indikator Kinerja berdasarkan Renstra KPU tahun 2020 – 2024 (sasaran strategis 3)

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%

5) Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Sasaran strategis dari kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dukungan dan pemenuhan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan maupun evaluasi pasca pemilu/pemilihan. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Tabel A.5. :

Indikator Kinerja berdasarkan Renstra KPU tahun 2020 – 2024 (sasaran strategis 5)

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

6) Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Sasaran strategis dari kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu/pemilihan sesuai jadwal tahapan. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Tabel A.6. :

Indikator Kinerja berdasarkan Renstra KPU tahun 2020 – 2024 (sasaran strategis 6)

<b>No. (1)</b>	<b>Indikator Kinerja (2)</b>	<b>Target (3)</b>
1.	Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Kategori Capaian Kinerja

<b>No.</b>	<b>Rentang Capaian Kinerja</b>	<b>Kategori Capaian Kinerja</b>
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70 % - 85%	Baik
4.	55% - 70%	Cukup Baik
5.	< 55%	Kurang Baik

Sebagaimana sudah ditetapkan dalam penetapan kinerja (TAPKIN) tahun 2016 atau disebut dengan Perjanjian Kinerja (PK) (Perpres 29 tahun 2014 dan Kepmenpan RB No. 53 tahun 2014), maka selanjutnya akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis capaian dari masing-masing sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik selama tahun 2021, sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>	:	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
------------------	---	---

Indikator Kinerja untuk sasaran strategis ini adalah Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya dengan target 95%. Kewenangan melakukan analisis jabatan terhadap pegawai di lingkungan kabupaten/kota adalah kewenangan KPU RI, KPU Kabupaten Gresik dalam rangka menyesuaikan kompetensi dengan jabatan masih menggunakan jumlah SDM yang ada dengan SK jabatan masing-masing pegawai yang memuat jenis jabatannya yang diterbitkan KPU RI. Sejauh ini, dari total kebutuhan pegawai sesuai dengan peraturan KPU nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota jumlah kebutuhan ASN sekretariat KPU kabupaten Gresik adalah 25 orang, saat ini ASN KPU Kabupaten Gresik berjumlah 13 orang.

Tahun 2021, Pelaksanaannya adalah tercapainya layanan kepegawaian meliputi pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kabupaten Gresik yang dilaksanakan tepat waktu. Ukuran keberhasilan dapat dilihat dari serapan anggaran yang mencapai 99,88% yaitu dari anggaran sebesar Rp. 2.204.263.000 yang disediakan, terserap sebesar Rp. 2.201.677.339. Meningkat dibandingkan tahun 2020, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.201.285.000, realisasi sebesar Rp. 2.011.059.903 atau 91,85%. Pada tahun 2021, terdapat tambahan 2 CPNS serta 1 PNS yang mutasi dari KPU Kota Surabaya dan ada 1 PNS DPK yang kembali ke instansi pemerintah daerah.

Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Kategori
1	2	4	5
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	52%	Cukup Baik

<b>Sasaran 2</b>	:	<b>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU</b>
------------------	---	---

Indikator Kinerja untuk sasaran strategis ini Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik dengan target 100%. Ada 3 tujuan dari sasaran ini meliputi

1. sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
2. fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
3. Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan meliputi inventarisasi kebutuhan dan pemeliharaan kendaraan dinas, kebutuhan sehari-hari perkantoran, Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan kantor dengan memperbaiki teras kantor, pembuatan jalur khusus disabilitas, perbaikan atap kantor yang berpotensi bocor saat hujan, Pembayaran Terkait pelaksanaan Operasional kantor, Honor Operasional Satuan Kerja, pemeliharaan gudang dan gedung.

Selain itu kegiatan yang dilakukan guna fasilitasi guna mendukung kinerja pegawai berupa fasilitas untuk keperluan sehari-hari perkantoran (berupa : ATK, langganan koran/majalah/alat rumah tangga, dll), melakukan perawatan gedung, perawatan halaman, perawatan 7 unit kendaraan roda 4,

perawatan 6 unit kendaraan roda 2, perawatan sarana gedung, pembayaran listrik, air, telepon, pengiriman surat-surat dinas, pembayaran honor satpam/sopir/pramubakti, pembayaran honor pelaksana kegiatan dan pengadaan pakaian dinas PNS untuk 13 PNS dan 8 orang pegawai PPNPN meliputi satpam/pramusaji/sopir dan jamuan untuk tamu. Output kegiatan layanan perkantoran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik, mendapat alokasi anggaran Rp. 599.461.000 dengan serapan sebesar Rp. 550.291.217 atau sebesar 91,80%. Mengalami kenaikan dari tahun 2020, kegiatan serupa mendapat alokasi anggaran Rp. 647.278.000 dengan serapan sebesar Rp. 551.347.908 atau sebesar 85,18%.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Kategori</b>
1	2	4	5
<b>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>91,8%</b>	<b>Sangat baik</b>

<b>Sasaran 3</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU</b>
------------------	----------	--

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Gresik, evaluasi yang dilakukan dengan penilaian atas SAKIP KPU Kabupaten Gresik tahun 2020, melalui Lembar Kerja Evaluasi

mandiri atas SAKIP, KPU Kabupaten Gresik mendapatkan indeks nilai 57,16 atau CC. KPU Kabupaten Gresik juga mendapatkan hasil evaluasi atas SAKIP tahun 2020 dari KPU Provinsi Jawa Timur pada bulan Juni tahun 2021. Masih sama dengan hasil tahun sebelumnya, maka tahun berikutnya menargetkan indeks nilai SAKIP menjadi B.

Selain itu KPU kabupaten Gresik juga melaksanakan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai setelah pelaksanaan kick off reformasi birokrasi dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di bulan Juni tahun 2021. Berdasarkan self assesment dengan mengisi lembar kerja evaluasi (LKE) RB, KPU Kabupaten Gresik mendapatkan nilai 51,53% atau CC. Target minimal B belum tercapai karena beberapa faktor meliputi, waktu yang disediakan untuk pelaksanaan RB mulai dari tindak lanjut hasil kick off hingga penyusunan dan penetapan SK Tim dan SK rencana aksi kinerja belum maksimal karena baru pertama kali dilaksanakan. Selain itu, kesulitan pengisian terhadap unsur-unsur dalam LKE RB yang diintegrasikan kedalam kegiatan yang sudah dilakukan juga menjadi kendala. Sedangkan pada tahun 2020, belum dilaksanakan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Gresik.

Namun demikian, pelaksanaan RB di KPU Kabupaten Gresik dinilai cukup baik karena proses pelaksanaan RB sudah dilaksanakan dengan baik diantaranya :

1. Pembuatan SK terkait TIM RB, Agent of change serta RAK RB
2. Melakukan rapat tindak lanjut kick off meeting RB, rapat koordinasi tim RB dan agent of change, rapat monitoring dan evaluasi 8 tim RB
3. Melakukan pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan.
4. Melakukan pengisian LKE RB.

- 5. Membuat baliho Zona Integritas, wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Perbaikan	Budget	Penjelasan	Pf/Hasil	Indikator	Nilai	W	Caranya/Berbagai/Perbaikan
1. BUDJETO	10.00				10.00	10.00%	
4. PEMERIKSAAN	10.00				10.00	10.00%	
2. MANAJEMEN PERUBAHAN	1.00				1.00	1.00%	
1. Tim Reformasi Birokrasi	0.40				0.40	0.75%	
a. Tim Reformasi Birokrasi/Pemangung jawah reformasi birokrasi unit kerja telah dibentuk		a. Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi/Pemangung jawah reformasi birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Pemangung jawah reformasi birokrasi unit kerja dalam masa ketetapan formal	A/W/C	A	1.00		
b. Tim Reformasi Birokrasi/Pemangung jawah reformasi birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja		a. Telah melaksanakan Tim Reformasi Birokrasi/Pemangung jawah reformasi birokrasi unit kerja b. Telah tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Pemangung jawah reformasi birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Pemangung jawah reformasi birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Pemangung jawah reformasi birokrasi unit kerja	A/W/C/D	A	1.00		

**Manajemen Perubahan**

- Kick Off Meeting dengan KPU Provinsi
- Kick Off Meeting Internal KPU Gresik
- Sosialisasi & FGD Internal KPU Gresik
- Menyanyunkan Lagu Indonesia Raya

[www.kab-gresik.kpu.go.id](http://www.kab-gresik.kpu.go.id)
 | 
 KPU Kabupaten Gresik
 | 
 @kougresik
 | 
 KPU GRESIK
 | 
 kpugresik

Untuk indikator kinerja Opini BPK atas laporan keuangan KPU, KPU kabupaten Gresik hanya melaksanakan review atas laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat/BPK. Keseluruhan hasil merupakan wilayah KPU RI untuk diberikan penilaian oleh BPK. Tahun 2020, KPU mendapat predikat WTP dari BPK. permasalahan dalam administrasi keuangan seringkali dapat diselesaikan dengan dilakukannya koordinasi maupun review oleh inspektorat. Pengukuran atas indikator kinerja didasarkan pada 2 (dua) hasil review oleh inspektorat KPU RI atas laporan keuangan yang telah disusun (review laporan tahunan 2020 dan semester 1 2021). Realisasi atas target mencapai 100%.

Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Kategori
1	2	4	5
<b>Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU</b>	<b>B</b>	<b>CC</b>	<b>Sangat baik</b>
<b>Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>Sangat baik</b>

<b>Sasaran 4</b>	<b>:</b>	<b>Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan</b>
------------------	----------	--

Pada tahun 2021, KPU Kabupaten Gresik melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) menindaklanjuti surat KPU nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 serta surat KPU nomor 366/PL.02-SD/01/VI/2021 tanggal 21 April 2021 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan serta berpedoman pada Peraturan KPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kegiatan PDPB, KPU Kabupaten Gresik membuat strategi diantaranya :

1. Mengoptimalkan media sosial sebagai sarana bagi masyarakat melaporkan status nya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Pemilih pemula bisa melaporkan lewat aplikasi yang disediakan dalam media sosial yang memuat barcode untuk memudahkan pengisian data.
2. Melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengetahui informasi kependudukan secara real time terkait pemilih baru maupun pemilih pindah masuk.
3. Melakukan strategi ‘turun kebawah’ berkoordinasi dengan pemerintah di wilayah desa/kelurahan untuk mengetahui informasi data penduduk meninggal, pemilih baru atau penduduk keluar masuk.
4. Melaksanakan forum koordinasi dengan stakeholder terkait masukan/saran dari pihak terkait seperti Bawaslu kabupaten Gresik, Dispendukcapil, TNI maupun Polri.

Data update pemilih dari beberapa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Gresik tersebut dilakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam rapat pleno setiap bulan dengan hasil yang ditanda tangani dalam berita acara. Rekapitulasi dimaksud dengan berdasarkan pada DPT pemilihan terakhir di tahun 2020. Selama 10 bulan sejak surat KPU RI diterbitkan, KPU Kabupaten Gresik telah tuntas melaksanakan PDPB di tahun 2021. Target 100% telah terpenuhi di indikator

kinerja ini, sedangkan serapan anggaran sebesar 98,88% dari anggaran Rp. 29.440.000 terserap sebesar Rp. 29.111.000.

Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Kategori
1	2	4	5
<b>Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Sangat baik</b>







<b>Sasaran 5</b>	<b>:</b>	<b>Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan</b>
------------------	----------	---

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Tahun 2021, KPU Kabupaten Gresik melaksanakan pemeliharaan dan inventarisir logistik pemilihan tahun 2020 diantaranya dengan kegiatan yang dilakukan dengan evaluasi distribusi logistik Pemilihan 2020 serta penataan arsip logistik pemilihan tahun 2020 serta menyusun DIM evaluasi distribusi logistik untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar 98,15% dari pagu Rp. 1.788.000 terealisasi sebesar Rp. 1.755.000. Sedangkan indikator kinerja kedua adalah Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan, dengan melakukan penyusunan laporan dan evaluasi logistik pemilihan tahun 2020, serapan anggaran untuk pembelian ATK bahan penyusunan laporan yang mencapai 98,21% dari pagu Rp. 1.848.000 terealisasi sebesar Rp. 1.815.000.

Kegiatan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan (penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi Pemilihan) diantaranya adalah kegiatan stock opname BMN yang rusak maupun masih berfungsi untuk diusulkan penghapusan BMN serta penghapusan serta lelang surat suara, bilik dan kotak suara berbahan karton pada pemilihan tahun 2020. Anggaran yang diserap dalam kegiatan ini sebesar 98,12%, sesuai dengan target indikator ini sebesar 98%.

Selama tahun 2021, KPU Kabupaten Gresik telah melaksanakan penataan, dokumentasi dan pengarsipan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan. Selain itu, KPU Kabupaten Gresik juga mengundang Badan

Arsip Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melakukan pendampingan dalam penataan arsip. Arsip yang ditata dan dikelola meliputi arsip aktif dan inaktif yang dimiliki disesuaikan dengan JRA KPU.

Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Kategori
1	2	4	5
<b>Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>Sangat baik</b>

<b>Sasaran 6</b>	<b>:</b>	<b>Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</b>
------------------	----------	---

Indikator kinerja adalah Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. Tahun 2021, berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Walikota Tahun 2020, KPU Kabupaten Gresik menyusun laporan tahapan pemilihan tahun 2020 untuk kemudian dilaporkan kepada KPU RI, Kemendagri, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, DPRD Kabupaten Gresik serta KPU Provinsi Jawa Timur.





Selain itu, KPU Kabupaten Gresik juga melaksanakan evaluasi serta menghimpun laporan pelaksanaan pemilihan dari PPK maupun PPS. Di tingkat KPU Provinsi, KPU kabupaten Gresik juga mengikuti evaluasi tahapan pemilihan tahun 2020 dengan mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya, persentase parmas tertinggi se Jawa Timur dan sederet penghargaan lain. KPU Kabupaten Gresik juga telah menyetorkan sisa anggaran hibah pemilihan tahun 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 5.469.513.511 pada bulan April 2021. Dari keseluruhan tahapan

yang telah dilalui, KPU kabupaten Gresik telah melaksanakan 100% target Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Kategori
1	2	4	5
<b>Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Sangat baik</b>



### C. Akuntabilitas Keuangan

Pada awal Tahun 2021, KPU Kabupaten Gresik mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 2.826.368.000. Dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, DIPA KPU Kabupaten Gresik mengalami 7 kali revisi anggaran baik revisi output maupun revisi DIPA. Revisi terakhir tanggal 7 Desember 2021 menjadi sebesar Rp. 6.794.445.000. Perubahan revisi terakhir tersebut diakibatkan adanya revisi belanja pegawai serta POK, *refocussing* anggaran dan masuknya anggaran hibah pemilihan yang dilakukan di tahun 2021. Dibandingkan tahun 2020, KPU Kabupaten Gresik mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 3.164.222.000. Dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, DIPA KPU Kabupaten Gresik mengalami 8 kali revisi. Revisi terakhir tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 87.417.565.000 yang diakibatkan revisi dana hibah pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gresik Tahun 2020 yang diintegrasikan kedalam anggaran APBN sebesar Rp. 61.100.000.000. selain merevisi anggaran hibah pemilihan tahun 2020, DIPA APBN bertambah karena adanya tambahan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dalam rangka pencegahan covid 19 yang dilakukan beberapa tahap serta untuk mengakomodir APD setiap tahapan pemilihan serentak 2020.

Menutup tahun anggaran 2021, serapan anggaran KPU Kabupaten Gresik melampaui target yang direncanakan sebesar 95%. Sampai dengan bulan Desember, serapan anggaran atau realisasi anggaran sebesar Rp. 6.781.976.068 dari pagu Rp. 6.794.445.000, atau sebesar 98,89%. Sedangkan tahun 2020, dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 87.417.565.000, dicapai realisasi sebesar Rp. 62.197.338.383 atau mencapai prosentase 71%%.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sangat sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh bagian dan komitmen bersama sepanjang tahun 2021 guna melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Keuangan tahun 2021 ini dapat dilihat sebagai berikut:

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB	PAGU DIPA REVISI	JUMLAH	SISA ANGGARAN	PROSE NTASE
		OUTPUT/KOMPONEN/AKUN				
1		2	3	16=4 S/D 15	17=3-16	
1	076.01.C Q	<b>PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>	51,855,000	45,884,200	5,970,800	88,49%
1.1	3356	KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN DATA KEBUTUHAN, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, SERTA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU/PEMILIHAN	10,344,000	7,190,000	3,154,000	69,51%
1.2	3363	PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDNG- UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU	4,351,000	4,045,300	305,700	92,97%
1.3	3364	FASILITASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILUKADA, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAW	37,160,000	34,648,900	2,511,100	93,24%
		HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	3,840,090,312	3,840,090,312	5,074,688	99,87
2	076.01.W A	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	2,897,425,000	2,833,001,670	64,423,444	97,98%
2.1	3355	PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DILINGKUNGAN SETJEN KPU	2,240,448,000	2,228,637,839	11,810,161	86,95%
2.2	3357	PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA	49,152,000	46,552,000	2,600,000	94,71%
2.3	3360	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN SERTA DUKUNGAN SARANA PRASARANA	604,061,000	554,571,217	49,489,783	91,81%
2.4	3361	PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA	3,764,000	3,240,500	523,500	86,09
		<b>JUMLAH</b>	<b>6,794,445,000</b>	<b>6,718,976,068</b>	<b>75,468,932</b>	<b>98,89%</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

LAKIP KPU Kabupaten Gresik Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Pusat dan Renstra KPU Kabupaten Gresik tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja) /Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Penetapan Kinerja tahun 2021. Karena KPU Kabupaten Gresik merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gresik Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Dalam tahun 2021, Sekretariat KPU Kabupaten Gresik menetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,33 %, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja

sasarannya. Dalam tahun 2021, KPU Kabupaten Gresik menetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 87 %, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.

Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat KPU Kabupaten Gresik dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 sebesar 6.781.976.068 dari pagu Rp. 6.794.445.000, atau terealisasi sebesar 98,89%.

## **B. Saran**

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik kedepan, antara lain :

- 1) Melakukan evaluasi semua unsur dalam internal KPU Kabupaten Gresik;
- 2) Melakukan identifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
- 3) Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media sosial maupun website dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan baik oleh KPU Kabupaten Gresik terlebih dilakukan di masa pandemi covid 19;
- 4) Inovasi dan strategi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mumpuni;
- 5) Melakukan monitoring atas realisasi anggaran setiap bulan;

- 6) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dan penyusunan LK;
- 7) Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
- 8) Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdaya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Gresik.
- 9) Memaksimalkan pemeliharaan terhadap aset dan barang milik negara.
- 10) Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Gresik.
- 11) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat KPU untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
- 12) Mengoptimalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Gresik secara berkala dalam laman tersendiri di web site.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Gresik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Gresik.

# LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD RONI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**GRESIK, 7 JANUARI 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

  
**AKHMAD RONI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FAHRUDDIN  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD RONI  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**GRESIK, 7 JANUARI 2021**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA KPU KAB. GRESIK,**



**AKHMAD RONI**

**PIHAK PERTAMA**

**SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK,**



**AHMAD FAHRUDDIN**

PERJANJIAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Program	Anggaran	
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	6.111.387.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.774.513.000
Total	Rp.	8.885.900.000


KETUA KPU KAB. GRESIK



AKHMAD RONI

GRESIK, 7 JANUARI 2021

SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK



AHMAD FAHRUDDIN

PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gresik	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%
4	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
5	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
6	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%

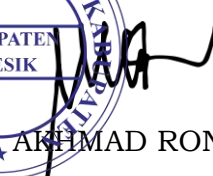
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%

11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%
12	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
13	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase perlengkapan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	60%
14	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	90%
15	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	90%
		Persentase satker memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	90%
		Persentase memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	90%

		Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	100%
16	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
17	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
18	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%

19	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
----	--	---	------

Program	Anggaran	
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	6.111.387.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.774.513.000
Total	Rp.	8.885.900.000

KETUA KPU KAB. GRESIK  
  
 AKHMAD RONI

GRESIK, 7 JANUARI 2021  
 SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK  
  
 AHMAD FAHRUDDIN

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			3,897,020,000	
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan			10,344,000	
3356.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[Base Line]	1.0 NSPK		1,788,000	
-----					
3356.AFA.010	Lokasi : KAB. GRESIK	1.0 NSPK		1,788,000	
005	Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu			1,788,000	U
A	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			1,788,000	
521211	Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020			1,788,000	
	Belanja Bahan			1,788,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Bahan	1.0 PAKET	1,788,000	1,788,000	
3356.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Base Line]	1.0 Layanan		6,708,000	
-----					
3356.EAB.008	Lokasi : KAB. GRESIK	1.0 Layanan		6,708,000	
005	Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan			6,708,000	U
A	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			6,708,000	
521211	Pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan			1,788,000	RM
	Belanja Bahan			1,788,000	
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Bahan	1.0 PAKET	1,788,000	1,788,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			2,120,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.0 PAKET	2,120,000	2,120,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			2,500,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Pengumuman Lelang di Media Cetak	1.0 PKT	2,500,000	2,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			300,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Transport Kegiatan Koordinasi/Konsultasi	1.0 PKT	300,000	300,000	
3356.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Base Line]	1.0 Laporan		1,848,000	
-----					
3356.EAL.010	Lokasi : KAB. GRESIK	1.0 Laporan		1,848,000	
005	Inventarisasi Logistik Pemilu			1,848,000	U
A	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			1,848,000	
521211	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan			1,848,000	RM
	Belanja Bahan			1,848,000	
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Bahan	1.0 PAKET	1,848,000	1,848,000	
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu			4,351,000	
3363.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	1.0 layanan		1,876,000	
-----					
3363.BAH.011	Lokasi : KAB. GRESIK	1.0 layanan		1,876,000	
005	Layanan Administrasi Kepemiluan			1,876,000	U
	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			1,876,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM			1,876,000	
521211	Belanja Bahan			1,876,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- KONSUMSI RAPAT DENGAN PARTAI POLITIK Peserta KPU Kabupaten/Kota	1.0 pkt	1,876,000	1,876,000	
3363.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1.0 layanan		2,475,000	
	Lokasi : KAB. GRESIK				
3363.BMA.012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1.0 layanan		2,475,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			2,475,000	U
A	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum			2,475,000	
521211	Belanja Bahan			1,160,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- konsumsi rapat	1.0 pkt	1,160,000	1,160,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1,315,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- ATK	1.0 pkt	1,315,000	1,315,000	
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW			3,882,325,000	
3364.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	2.0 Orang		3,874,165,000	
	Lokasi : KAB. GRESIK				
3364.BAA.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	1.0 Orang		29,000,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			29,000,000	U
A	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana			29,000,000	
521211	Belanja Bahan			8,290,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Konsumsi, Spanduk, Poster, Sertifikat, Semkit	1.0 PKT	8,290,000	8,290,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3,850,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Narasumber [1 ORG x 1 JAM x 7 KEG]	7.0 OK	550,000	3,850,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2,460,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Perjalanan Dinas ke Provinsi	1.0 PKT	2,460,000	2,460,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,400,000	RM
	(KPPN.031-Surabaya I )				
	- Transport Kegiatan BAKOHUMAS	1.0 PKT	14,400,000	14,400,000	
3364.BAA.008	Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	1.0 Orang/Daerah		3,845,165,000	
051	Perencanaan, Penyusunan, Sosialisasi/Bimtek			24,915,000	U
A	Penyusunan Produk-Produk Hukum			5,965,000	
521211	Belanja Bahan			5,965,000	HLD
	(KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)				
	- ATK, Penjilidan dan Konsumsi [1 PKT]	1.0 PKT	5,965,000	5,965,000	
B	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis			12,250,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			8,750,000	HLD
	- Belanja Bahan	1.0 pkt	8,750,000	8,750,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			3,500,000	HLD
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.0 pkt	3,500,000	3,500,000	
<i>M</i>	<i>Rapat Kerja dan Supervisi</i>			6,700,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			4,200,000	HLD
	- Belanja Bahan	1.0 pkt	4,200,000	4,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			2,500,000	HLD
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.0 pkt	2,500,000	2,500,000	
<b>052</b>	<b>Pencalonan dan kampanye</b>			<b>2,000,000</b>	<b>U</b>
<i>F</i>	<i>Pencalonan</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			2,000,000	HLD
	- Belanja Bahan	1.0 pkt	2,000,000	2,000,000	
<b>053</b>	<b>Pembentukan Badan Adhock</b>			<b>500,000</b>	<b>U</b>
<i>C</i>	<i>Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP</i>			500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			500,000	HLD
	- ATK, Konsumsi dan lain-lain	1.0 PKT	500,000	500,000	
<b>054</b>	<b>Penyusunan DPT</b>			<b>1,000,000</b>	<b>U</b>
<i>D</i>	<i>Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih</i>			1,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			1,000,000	HLD
	- ATK, Konsumsi dan lain-lain	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
<b>055</b>	<b>Pengelolaan logistik, pemungutan dan rekapitulasi suara</b>			<b>148,900,000</b>	<b>U</b>
<i>I</i>	<i>Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara</i>			23,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			1,500,000	HLD
	- ATK, Konsumsi, Seminar Kit dan lain-lain	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			2,500,000	HLD
	- Jasa Shooting Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Paslon	1.0 PKT	2,500,000	2,500,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			19,000,000	HLD
	- Paket Meeting Bimtek, Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Paslon Terpilih	1.0 PKT	19,000,000	19,000,000	
<i>K</i>	<i>Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</i>			112,500,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - Honorarium Pokja ULP, Tenaga Pendukung dan Operator	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	HLD
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - Perjalanan Dinas Cek Lokasi dan Survey Pengadaan	1.0 PKT	62,500,000	62,500,000	HLD
T	<i>Pengelolaan Logistik Pemilihan</i>			13,400,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - Belanja Bahan Operasional Pengelolaan Logistik	1.0 PKT	2,500,000	2,500,000	HLD
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - Jasa Pengelolaan Logistik Pemilihan	1.0 PKT	10,900,000	10,900,000	HLD
<b>056</b>	<b>Advokasi, Audit, Evaluasi dan Pelaporan</b>			<b>3,667,850,000</b>	<b>U</b>
N	<i>Perjalanan Dinas</i>			26,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - Perjalanan Dinas dalam rangka Raker/Bimtek/Konsultasi	1.0 PKT	16,500,000	16,500,000	HLD
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Supervisi	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	HLD
O	<i>Evaluasi dan Pelaporan</i>			114,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - ATK, banner dan Cetak Buku Laporan	1.0 PKT	8,000,000	8,000,000	HLD
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - Paket Meeting Kegiatan Workshop dan Evaluasi Tahapan	1.0 PKT	106,000,000	106,000,000	HLD
P	<i>Pemeliharaan</i>			46,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - Pemeliharaan Inventaris Kantor dan Kendaraan Operasional	1.0 PKT	46,000,000	46,000,000	HLD
Q	<i>Bahan Bakar Minyak Roda 4 dan 2</i>			32,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - BBM Kendaraan Operasional	1.0 PKT	32,000,000	32,000,000	HLD
R	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			221,850,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A) - ATK, Konsumsi dan lain-lain	1.0 PKT	215,750,000	215,750,000	HLD

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			6,100,000	HLD
W	- Langganan Daya Listrik	1.0 PKT	6,100,000	6,100,000	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan			105,000,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			105,000,000	HLD
X	- Honor Pokja	1.0 PKT	105,000,000	105,000,000	
	Honorarium Penyelenggara Pemilihan			3,122,500,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.031-Surabaya I / Reg. 2S8ADH1A)			3,122,500,000	HLD
	- Honorarium PPK dan PPS	1.0 PKT	3,122,500,000	3,122,500,000	
3364.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	1.0 layanan		2,000,000	
3364.BAH.030	Lokasi : KAB. GRESIK Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1.0 layanan		2,000,000	U
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			2,000,000	
A	Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Dan Pemilihan			2,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.031-Surabaya I )			2,000,000	RM
	- ATK	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
3364.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1.0 layanan		1,000,000	
3364.BMA.005	Lokasi : KAB. GRESIK Publikasi Informasi	1.0 layanan		1,000,000	U
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			1,000,000	
A	PENERBITAN BAHAN INFORMASI DAN KLIPING KEPEMILUAN DAN PILKADA			1,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.031-Surabaya I )			1,000,000	RM
	- ATK	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
3364.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Base Line]	1.0 Laporan		5,160,000	
3364.EAL.031	Lokasi : KAB. GRESIK Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pilukada	1.0 Laporan		5,160,000	U
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			5,160,000	
A	Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020			5,160,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.031-Surabaya I )			5,160,000	RM
	- Perjalanan Dinas Biasa	1.0 PKT	5,160,000	5,160,000	
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen			2,897,425,000	
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU			2,240,448,000	
3355.EAA	Layanan Perkantoran[Base Line]	1.0 Layanan		2,204,263,000	
3355.EAA.994	Lokasi : KAB. GRESIK Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		2,204,263,000	U
001	Gaji dan Tunjangan			2,204,263,000	
A	Gaji dan tunjangan			2,145,048,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			577,204,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 PKT	577,204,000	577,204,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			9,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 PKT	9,000	9,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			42,473,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 PKT	42,473,000	42,473,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			15,130,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 PKT	15,130,000	15,130,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			47,880,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 PKT	47,880,000	47,880,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			800,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 PKT	800,000	800,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			1,402,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 PKT	1,402,000	1,402,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			38,093,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 PKT	38,093,000	38,093,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			113,663,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 PKT	113,663,000	113,663,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			19,470,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 PKT	19,470,000	19,470,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.031-Surabaya I )			60,000	RM
	- Belanja Uang Lembur	1.0 PKT	60,000	60,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.031-Surabaya I )			1,288,864,000	RM
	- TUKIN dan Uang Kehormatan	1.0 PKT	1,288,864,000	1,288,864,000	
RS	<i>Tambahan Gaji</i>			100,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.031-Surabaya I )			100,000	RM
	- Tambahan Gaji	1.0 PKT	100,000	100,000	
TK	<i>Tambahan Kekurangan Gaji</i>			59,115,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.031-Surabaya I )			59,115,000	RM
	- Tambahan Kekurangan Gaji	1.0 PKT	59,115,000	59,115,000	
3355.EAK	Layanan Pengawasan Internal[Base Line]	1.0 Laporan		10,050,000	
3355.EAK.007	Lokasi : KAB. GRESIK Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1.0 Laporan		10,050,000	U
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			10,050,000	
A	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan			10,050,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.031-Surabaya I )			1,340,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 paket	1,340,000	1,340,000	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.031-Surabaya I )			3,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.0 paket	3,000,000	3,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.031-Surabaya I )			2,062,000	RM
	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.0 paket	2,062,000	2,062,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.031-Surabaya I )			640,000	RM
	- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.0 paket	640,000	640,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.031-Surabaya I )			3,008,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 paket	3,008,000	3,008,000	
3355.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Base Line]	1.0 Laporan		26,135,000	
3355.EAL.003	Lokasi : KAB. GRESIK Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1.0 Laporan		26,135,000	U
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			26,135,000	
A	Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa-w			26,135,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.031-Surabaya I )			15,000,000	RM
	- Penanggung Jawab	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Koordinator	12.0 OB	250,000	3,000,000	
	- Ketua/Wakil Ketua	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Wakil Ketua	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Anggota	24.0 OB`	150,000	3,600,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.031-Surabaya I )			4,799,000	RM
	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.0 PAKET	4,799,000	4,799,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.031-Surabaya I )			320,000	RM
	- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.0 PAKET	320,000	320,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.031-Surabaya I )			6,016,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 PAKET	6,016,000	6,016,000	
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data			49,152,000	
3357.EAJ	Layanan Data dan Informasi[Base Line]	1.0 Layanan		29,440,000	
-----					
	Lokasi : KAB. GRESIK				
3357.EAJ.003	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1.0 Layanan		29,440,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			29,440,000	U
A	Pemutakhiran data pemilih			29,440,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.031-Surabaya I )			590,000	RM
	- Makan dan snack	1.0 PKT	590,000	590,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.031-Surabaya I )			1,200,000	RM
	- ATK	1.0 PKT	1,200,000	1,200,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.031-Surabaya I )			22,800,000	RM
	- Tenaga Pendukung [1 ORG x 6 BLN]	6.0 OB	3,800,000	22,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.031-Surabaya I )			1,100,000	RM
	- Perjalanan Dinas ke Provinsi	1.0 PKT	1,100,000	1,100,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.031-Surabaya I )			3,750,000	RM
	- Transport Kegiatan Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan [3 ORG x 10 KEG]	30.0 OK	125,000	3,750,000	
3357.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Base Line]	1.0 Laporan		7,394,000	
-----					
	Lokasi : KAB. GRESIK				
3357.EAL.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1.0 Laporan		7,394,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			7,394,000	U
A	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran KPU Tahun 2021			3,349,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.031-Surabaya I )			1,360,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 PKT	1,360,000	1,360,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.031-Surabaya I )			1,989,000	RM
	- ATK	1.0 PKT	1,989,000	1,989,000	
B	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021			4,045,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.031-Surabaya I )			2,470,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 PKT	2,470,000	2,470,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.031-Surabaya I )			1,575,000	RM
	- ATK	1.0 PKT	1,575,000	1,575,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3357.FAD	<u>Perencanaan dan Penganggaran[Base Line]</u>	1.0 Layanan		12,318,000	
	Lokasi : KAB. GRESIK				
3357.FAD.001	<b>Dokumen Perencanaan Anggaran</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>12,318,000</b>	
005	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>12,318,000</b>	U
A	<i>Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022</i>			8,771,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I )			680,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 PKT	680,000	680,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.031-Surabaya I )			2,191,000	RM
	- ATK	1.0 PKT	2,191,000	2,191,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.031-Surabaya I )			5,900,000	RM
	Rapat Kerja dengan KPU Provinsi terkait Dokumen - Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 dan Evaluasi Kinerja	1.0 PKT	5,900,000	5,900,000	
B	<i>Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2021</i>			3,547,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I )			182,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 PKT	182,000	182,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.031-Surabaya I )			2,365,000	RM
	- ATK	1.0 PKT	2,365,000	2,365,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.031-Surabaya I )			1,000,000	RM
	- Koordinasi ke KANWIL/KPPN/KPKNL	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
3360	<u>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana</u>			604,061,000	
3360.EAA	<u>Layanan Perkantoran[Base Line]</u>	1.0 Layanan		599,461,000	
	Lokasi : KAB. GRESIK				
3360.EAA.994	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>599,461,000</b>	
002	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>599,461,000</b>	U
A	<i>Operasional Kantor</i>			599,461,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.031-Surabaya I )			296,324,000	RM
	- Honor satpam dan sopir [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	4,135,000	148,860,000	
	- Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,759,000	90,216,000	
	- ATK, Jamuan Makan/Konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, Langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai	1.0 PKT	31,621,000	31,621,000	
	- Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Satpam/Sopir [3 ORG x 1 BLN]	3.0 OB	4,135,000	12,405,000	
	- Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Petugas Kebersihan/Pramubakti [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,759,000	7,518,000	
	- Penggantian Inventaris Lama	2.0 PKT	2,852,000	5,704,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.031-Surabaya I )			600,000	RM
	- Pengiriman Surat-Surat Dinas	1.0 PKT	600,000	600,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.031-Surabaya I )			95,520,000	RM
	- Honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola dan PPBJ	1.0 PKT	95,520,000	95,520,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.031-Surabaya I )			9,889,000	RM
	- Pakaian ASN, Satpam, Supir dan Pramubakti	1.0 PKT	9,889,000	9,889,000	
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.031-Surabaya I )			23,940,000	RM
	- APD Pencegahan COVID-19	1.0 PKT	23,940,000	23,940,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.031-Surabaya I )			33,938,000	RM
	- Biaya Listrik	1.0 THN	33,938,000	33,938,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.031-Surabaya I )			2,800,000	RM
	- Biaya Telepon	1.0 THN	2,800,000	2,800,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.031-Surabaya I )			245,000	RM
	- Biaya Air	1.0 THN	245,000	245,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.031-Surabaya I )			24,000,000	RM
	- Layanan Internet	1.0 THN	24,000,000	24,000,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.031-Surabaya I )			20,600,000	RM
	- Perawatan Gedung dan Bangunan serta halaman	1.0 PKT	20,600,000	20,600,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.031-Surabaya I )			89,775,000	RM
	- Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor	1.0 PKT	89,775,000	89,775,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.031-Surabaya I )			1,830,000	RM
	- Perjalanan Ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN	1.0 PKT	1,830,000	1,830,000	
<b>3360.EAD</b>	<b>Layanan Sarana Internal[Base Line]</b>	<b>1.0 unit</b>		<b>4,600,000</b>	
	Lokasi : KAB. GRESIK				
<b>3360.EAD.010</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Negara</b>	<b>1.0 unit</b>		<b>4,600,000</b>	
<b>005</b>	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>4,600,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Penatausahaan BMN</i>			<i>4,600,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.031-Surabaya I )			1,000,000	RM
	- ATK	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG (01) Komisi Pemilihan Umum  
 UNIT KERJA (657701) KPU KABUPATEN GRESIK  
 ALOKASI Rp.6,794,445,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.031-Surabaya I )			3,600,000	RM
	- Operator Simak BMN Persediaan [1 org x 12 bln]	12.0 ob	300,000	3,600,000	
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota			3,764,000	
3361.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Base Line]	1.0 Laporan		3,764,000	
	Lokasi : KAB. GRESIK				
3361.EAL.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1.0 Laporan		3,764,000	U
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			3,764,000	
A	Reviu Laporan Keuangan			2,678,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.031-Surabaya I )			514,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 paket	514,000	514,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.031-Surabaya I )			2,164,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 paket	2,164,000	2,164,000	
B	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota			1,086,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.031-Surabaya I )			904,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 paket	904,000	904,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.031-Surabaya I )			182,000	RM
	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.0 paket	182,000	182,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Gresik, 7 Desember 2021



*(Handwritten Signature)*

Ahmad Fahrudin  
 NIP. 196608221986031005

## KPU KABUPATEN GRESIK

## REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA

FORMAT LPAK 1

KODE SATKER : 657701

KPU KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/INDIKATOR/MAKLUK	PAU DIPA REVISI	REALISASI BULAN												JUMLAH	SISA ANGGARAN
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16+ SD 15	17+3-15	
1	076.01.CQ	Penyenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Desentral	3.857.320.000	-	-	-	3.840.096.312	892.508	-	1.577.208	-	9.229.200	8.930.000	9.478.900	18.589.188	3.886.971.812	11.045.488
	3206	Kegiatan teknis: Pengelolaan Data kebutuhan, pengalihan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan investasi logistik Pemilu/Pemilihan	19.344.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755.000	1.435.000	7.195.000	1.164.000
	336.AFA	Nama, Standart, Prosedur dan Kriteria	1.755.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755.000	-	1.755.000	33.000
	336.AFA.010	Sistematis dan Standar Pengalihan logistik Pemilu	1.755.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755.000	-	1.755.000	33.000
	905	Dukung Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.755.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755.000	-	1.755.000	33.000
	A	Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755.000	-	1.755.000	33.000
	52121	Belanja Bahan	1.755.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755.000	-	1.755.000	33.000
	336.EAB	Layanan Pemrosesan dan Penganggaran Internal	4.708.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620.000	1.620.000	1.688.000
	336.EAB.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	4.708.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620.000	1.620.000	3.888.000
	905	Dukung Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	4.708.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620.000	1.620.000	3.888.000
	A	Pendokumentasian dan Pengalihan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620.000	1.620.000	3.088.000
	52121	Belanja Bahan	1.708.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.000	620.000	968.000
	52101	Belanja Barang Peralatan Barang Konsumsi	2.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.120.000
	52101	Belanja Jasa Lainnya	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	0
	52413	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	0
	336.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1.848.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815.000	1.815.000	33.000
	336.EAL.010	Inventarisasi logistik Pemilu	1.848.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815.000	1.815.000	33.000
	905	Dukung Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.848.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815.000	1.815.000	33.000
	A	Penyusunan laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	1.848.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815.000	1.815.000	33.000
	52121	Belanja Bahan	1.848.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815.000	1.815.000	33.000
	3363	Penyusunan Penyusunan Rencana Paratras KPU, Advokasi, Penyelidikan Bergizi dan Penyuluhan Paratras Paratras-Unitas yang Berkaitan dengan Penyenggaraan Pemilu	4.381.000	-	-	-	-	892.508	-	-	-	-	800.000	-	1.412.300	4.045.308	366.700
	3363.BAH	Perjalanan Publik Lainnya	1.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.756.800	1.756.800	118.200

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/IAKUN	PAGU DIPA REVISI	REALISASI BULAN												JUMLAH 12+13+14+15	BISA ANGGARAN 17+18
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16+17+18	19+20	
	<b>3361.BAA.011</b>	<b>Layanan Administrasi Kependaan</b>	<b>1.876.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.756.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>119.200</b>
	<b>005</b>	<b>Dekangan Penyelenggaraan Tugas dan Pengeg Unit</b>	<b>1.876.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.756.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>119.200</b>
	<b>A</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LURUM</b>	<b>1.876.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.756.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>119.200</b>
	521211	Belanja Bahan	1.876.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.756.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>119.200</b>
	<b>3363.BMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>	<b>2.475.000</b>	-	-	-	-	<b>682.500</b>	-	-	-	-	<b>950.000</b>	-	<b>654.000</b>	<b>2.288.500</b>	<b>186.500</b>
	<b>3363.BMA.012</b>	<b>Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum</b>	<b>2.475.000</b>	-	-	-	-	<b>682.500</b>	-	-	-	-	<b>950.000</b>	-	<b>654.000</b>	<b>2.288.500</b>	<b>186.500</b>
	<b>005</b>	<b>Dekangan Penyelenggaraan Tugas dan Pengeg Unit</b>	<b>2.475.000</b>	-	-	-	-	<b>682.500</b>	-	-	-	-	<b>950.000</b>	-	<b>654.000</b>	<b>2.288.500</b>	<b>186.500</b>
	<b>A</b>	<b>Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum</b>	<b>2.475.000</b>	-	-	-	-	<b>682.500</b>	-	-	-	-	<b>950.000</b>	-	<b>654.000</b>	<b>2.288.500</b>	<b>186.500</b>
	521211	Belanja Bahan	1.160.000	-	-	-	-	<b>150.000</b>	-	-	-	-	<b>950.000</b>	-	-	<b>1.140.000</b>	<b>18.000</b>
	521511	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.315.000	-	-	-	-	<b>492.500</b>	-	-	-	-	-	-	<b>254.000</b>	<b>1.148.500</b>	<b>168.500</b>
	<b>3364</b>	<b>Pedikasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW</b>	<b>3.882.325.800</b>	-	-	-	<b>3.849.090.312</b>	-	-	<b>1.977.204</b>	-	<b>9.229.206</b>	<b>7.980.000</b>	<b>7.721.004</b>	<b>7.741.500</b>	<b>3.074.729.212</b>	<b>7.049.784</b>
	<b>3364.BAA</b>	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>	<b>3.874.185.000</b>	-	-	-	<b>3.849.090.312</b>	-	-	-	-	<b>9.229.206</b>	<b>7.980.000</b>	<b>7.721.004</b>	<b>7.890.000</b>	<b>3.066.110.512</b>	<b>6.954.488</b>
	<b>3364.BAA.007</b>	<b>Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rendah Konflik/Bencana</b>	<b>29.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9.229.206</b>	<b>7.980.000</b>	<b>7.721.004</b>	<b>3.890.000</b>	<b>28.029.200</b>	<b>978.800</b>
	<b>005</b>	<b>Dekangan Penyelenggaraan Tugas dan Pengeg Unit</b>	<b>29.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9.229.206</b>	<b>7.980.000</b>	<b>7.721.004</b>	<b>3.890.000</b>	<b>28.029.200</b>	<b>978.800</b>
	<b>A</b>	<b>Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rendah Konflik/Bencana</b>	<b>29.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9.229.206</b>	<b>7.980.000</b>	<b>7.721.004</b>	<b>3.890.000</b>	<b>28.029.200</b>	<b>978.800</b>
	521211	Belanja Bahan	6.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.320.206</b>	<b>1.980.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>6.289.200</b>	<b>800</b>
	522151	Belanja Jasa Profesi	3.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>550.000</b>
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.081.000</b>	-	<b>2.081.000</b>	<b>379.000</b>
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.800.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>14.350.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>3364.BAA.008</b>	<b>Tahapan Pemilihan Kepala Daerah</b>	<b>3.845.185.000</b>	-	-	-	<b>3.840.090.312</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.840.090.312</b>	<b>3.874.488</b>	
	<b>001</b>	<b>Perencanaan, Penyusunan, Sosialisasi dan Bimtek</b>	<b>24.915.000</b>	-	-	-	<b>23.961.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>23.961.000</b>	<b>954.000</b>	
	<b>A</b>	<b>Penyusunan Produk-Produk Hukum</b>	<b>5.965.000</b>	-	-	-	<b>5.963.500</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.963.500</b>	<b>1.500</b>	
	521211	Belanja Bahan	5.965.000	-	-	-	<b>5.963.500</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.963.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>B</b>	<b>Sosialisasi/Perkuliahan/Embrigam Teknik</b>	<b>12.250.000</b>	-	-	-	<b>11.600.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>11.600.000</b>	<b>650.000</b>	
	521211	Belanja Bahan	6.750.000	-	-	-	<b>6.600.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.600.000</b>	<b>150.000</b>	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000	-	-	-	<b>3.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	
	<b>M</b>	<b>Rapat Kerja dan Supervisi</b>	<b>6.700.000</b>	-	-	-	<b>6.357.500</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.357.500</b>	<b>302.500</b>	
	521211	Belanja Bahan	4.300.000	-	-	-	<b>4.147.500</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.147.500</b>	<b>52.500</b>	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	-	-	-	<b>2.250.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.250.000</b>	<b>250.000</b>	
	<b>002</b>	<b>Pencalonan dan Kampanye</b>	<b>3.000.000</b>	-	-	-	<b>1.880.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.880.000</b>	<b>148.000</b>	

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/TROMPORENAKUH	PAGU DPA REVISI	REALISASI BULAN												JUMLAH 10+11-12	BISA ANGGARAN 17+18-19
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUN	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16+17-18	17+18-19	
	F	Pencetakan	2.000.000	-	-	-	1.880.000	-	-	-	-	-	-	-	1.880.000	140.000	
	521211	Belanja Bahan	2.000.000	-	-	-	1.880.000	-	-	-	-	-	-	-	1.880.000	140.000	
	053	Pembentukan Badan Adhock	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	
	C	Pembentukan RPK, PPS, KPPS dan RPDP	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	
	521211	Belanja Bahan	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	
	054	Penyusunan DPT	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
	D	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
	521211	Belanja Bahan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
	055	Pengelolaan Logistik, Pemungutan dan Rekapitulasi Suara	148.990.000	-	-	-	147.370.480	-	-	-	-	-	-	-	147.370.480	829.520	
	I	Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	23.000.000	-	-	-	22.346.000	-	-	-	-	-	-	-	22.346.000	654.000	
	521211	Belanja Bahan	1.500.000	-	-	-	1.496.000	-	-	-	-	-	-	-	1.496.000	4.000	
	522181	Belanja Jasa Lainnya	2.500.000	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	300.000	
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.000.000	-	-	-	14.650.000	-	-	-	-	-	-	-	14.650.000	350.000	
	H	Pengadaban dan Pendistribusian Perangkat Pemungutan dan Penghitungan Suara	112.000.000	-	-	-	112.249.480	-	-	-	-	-	-	-	112.249.480	250.520	
	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	0	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	62.500.000	-	-	-	62.249.480	-	-	-	-	-	-	-	62.249.480	250.520	
	T	Pengelolaan Logistik Pemilihan	12.490.000	-	-	-	13.375.000	-	-	-	-	-	-	-	13.375.000	25.000	
	521211	Belanja Bahan	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	0	
	522181	Belanja Jasa Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.875.000	-	-	-	-	-	-	-	10.875.000	25.000	
	056	Advokasi, Audit, Evaluasi dan Pelaporan	3.467.850.000	-	-	-	3.466.298.832	-	-	-	-	-	-	-	3.466.298.832	1.551.168	
	H	Perjalanan Dinas	26.000.000	-	-	-	25.926.380	-	-	-	-	-	-	-	25.926.380	73.620	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	16.500.000	-	-	-	16.008.360	-	-	-	-	-	-	-	16.008.360	491.640	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000	-	-	-	9.920.000	-	-	-	-	-	-	-	9.920.000	80.000	
	D	Evaluasi dan Pelaporan	114.000.000	-	-	-	113.754.000	-	-	-	-	-	-	-	113.754.000	246.000	
	521211	Belanja Bahan	8.500.000	-	-	-	7.876.000	-	-	-	-	-	-	-	7.876.000	121.000	
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	106.000.000	-	-	-	105.878.000	-	-	-	-	-	-	-	105.878.000	125.000	
	P	Pemeliharaan	46.000.000	-	-	-	45.870.107	-	-	-	-	-	-	-	45.870.107	129.893	
	523121	Belanja pemeliharaan dan Mesin	46.000.000	-	-	-	45.870.107	-	-	-	-	-	-	-	45.870.107	129.893	
	G	Bahan Bakar Minyak Roda 4 dan 2	31.000.000	-	-	-	31.755.027	-	-	-	-	-	-	-	31.755.027	244.573	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.000.000	-	-	-	31.755.027	-	-	-	-	-	-	-	31.755.027	244.573	
	R	Pelayanan Administrasi Perencanaan	221.850.000	-	-	-	221.741.318	-	-	-	-	-	-	-	221.741.318	108.682	
	521211	Belanja Bahan	215.700.000	-	-	-	215.700.000	-	-	-	-	-	-	-	215.700.000	60.000	
	522111	Belanja Langganan Listrik	6.100.000	-	-	-	6.041.318	-	-	-	-	-	-	-	6.041.318	58.682	
	W	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan	104.000.000	-	-	-	104.850.000	-	-	-	-	-	-	-	104.850.000	150.000	
	521215	Belanja Honor Output Kegiatan	105.000.000	-	-	-	104.850.000	-	-	-	-	-	-	-	104.850.000	150.000	
	X	Honorarium Penyelenggara Pemilihan	3.122.500.000	-	-	-	3.122.400.000	-	-	-	-	-	-	-	3.122.400.000	100.000	
	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.122.500.000	-	-	-	3.122.400.000	-	-	-	-	-	-	-	3.122.400.000	100.000	
	3394.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1.977.200	-	-	-	-	1.977.200	22.800	
	3394.BAH.030	Dokumentasi Teknis Panitia Legislatif, Panitia Presiden dan Wakil Presiden	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1.977.200	-	-	-	-	1.977.200	22.800	
	006	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Pengerjaan Unit	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1.977.200	-	-	-	-	1.977.200	22.800	







NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/IAKUN	PAGU DIPA REVISI	REALISASI BULAN												JUMLAH	SISA ANGGARAN	
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16+17	18		
	3301.BAL	Layanan monitoring dan Evaluasi Internal	3.794.000	-	3.254.500	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	236.000	3.240.500	553.500
	3301.BAL.005	Laporan Hasil Renda Laporan Keuangan	3.794.000	-	3.254.500	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	236.000	3.240.500	553.500
	005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3.794.000	-	3.254.500	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	236.000	3.240.500	553.500
	A	Rendu Laporan Keuangan	2.678.000	-	2.254.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254.500	423.500
	521211	Belanja Bahan	514.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	14.000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	2.154.000	-	1.754.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.754.500	409.500
	B	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	1.586.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	296.000	946.000	640.000
	521211	Belanja Bahan	904.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	130.000	880.000	54.000
	521811	Belanja Barang Peralatan Barang Konsumsi	182.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	136.000	48.000
		<b>Jumlah</b>	<b>6.794.440.000</b>	<b>103.210.733</b>	<b>214.999.000</b>	<b>308.469.911</b>	<b>4.957.734.934</b>	<b>304.700.201</b>	<b>303.287.440</b>	<b>223.944.850</b>	<b>220.486.578</b>	<b>236.387.200</b>	<b>224.889.948</b>	<b>268.597.420</b>	<b>342.271.584</b>	<b>6.719.876.185</b>	<b>75.468.255</b>	

MENGETAHUI / MENYETUJUI  
 KLASA PENGGUNA ANGGARAN  
 KPU KABUPATEN GRESIK

*(Signature)*  
 Drs. AHMAD FAHRUDDIN, S.H.  
 NP. 19800822 198803 1 005

Gresik, 31 Desember 2021  
 BENDAHARA PENGELUARAN  
 KPU KABUPATEN GRESIK

*(Signature)*  
 SUYANTO  
 NP. 19820414 200701 1 001

NO	KODE AKUN BELANJA	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SSA PAGU	
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1	2	3	4	5	7=5/4	8	9=8/4	10=8-9	11=(10/5)	12=(5-10)	13=(5/12)
1	51	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.204.263.000	1.877.878.921	85%	223.786.892	10%	2.201.677.463	100%	2.808.647	0%
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	577.364.000	534.923.120	93%	42.261.040	7%	577.164.160	100%	139.840	0%
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.000	8.000	89%	538	6%	8.538	95%	462	5%
	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	42.473.000	39.438.798	93%	3.035.332	7%	42.474.130	100%	802	0%
	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	15.130.000	14.038.388	93%	1.091.562	7%	15.129.950	100%	1.472	0%
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	47.880.000	44.480.000	93%	3.420.000	7%	47.900.000	100%	-	0%
	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	800.000	380.000	48%	380.000	48%	720.000	90%	80.000	0%
	511128	Belanja Tunjangan PPh PNS	1.462.000	1.330.380	91%	61.240	4%	1.391.620	95%	10.400	1%
	511126	Belanja Tunjangan Besas PNS	36.083.000	35.340.980	98%	2.751.990	7%	36.092.970	100%	80	0%
	511129	Belanja Uang Makan PNS	113.663.000	94.238.000	83%	18.124.000	16%	112.362.000	99%	1.301.000	1%
	511161	Belanja Tunjangan Umum PNS	19.470.000	18.125.000	93%	1.285.000	7%	19.410.000	100%	60.000	0%
	512211	Belanja Uang Lembur	60.000	-	0%	-	0%	-	-	-	-
	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.347.979.000	1.185.637.941	88%	151.400.980	11%	1.347.047.601	100%	931.399	0%
2	52	<b>BELANJA BARANG</b>	4.880.182.000	4.386.826.087	90%	118.472.632	3%	4.517.299.729	93%	72.863.271	3%
	521111	Belanja Keperluan perkantoran	296.324.000	244.546.300	83%	42.546.000	14%	287.096.300	97%	9.227.700	3%
	521114	Belanja perjalanan dinas pos paket	600.000	501.600	84%	68.000	11%	569.600	95%	30.400	5%
	521116	Honor Operasional Satuan Kerja	110.520.000	91.068.000	82%	17.400.000	16%	108.468.000	98%	1.052.000	2%
	521118	Belanja beasiswa operasional lainnya	9.889.000	9.889.040	100%	-	0%	9.889.040	100%	960	0%
	521131	Belanja Barang Operasional-Peranginan Pandemi COVID-19	23.640.000	17.448.100	73%	6.309.116	26%	23.757.216	99%	182.784	1%
	521211	Belanja Bahan	280.800.000	262.952.200	94%	7.010.800	2%	269.963.000	96%	10.842.000	4%
	521219	Honor Output Kegiatan	3.281.100.000	3.280.250.000	100%	600.000	0%	3.280.850.000	100%	290.000	0%
	521341	Belanja Barang Non Operasional-Peranginan Pandemi COVID-19	3.060.000	-	0%	-	0%	-	0%	3.060.000	100%
	521811	Belanja barang untuk pelaksanaan barang konsumsi	22.788.000	13.277.200	58%	1.791.500	8%	15.068.700	66%	7.729.300	34%
	522111	Belanja Langganan Listrik	40.038.000	16.473.828	41%	1.953.546	5%	17.427.374	44%	22.210.627	55%
	522112	Belanja Langganan Telepon	2.800.000	1.482.185	53%	136.345	5%	1.618.540	58%	1.181.460	42%
	522113	Belanja Langganan Air	245.000	-	0%	-	0%	-	0%	245.000	100%
	522161	Belanja Jasa Profesi	3.850.000	2.750.000	71%	990.000	14%	3.300.000	86%	550.000	14%
	522199	Belanja Jasa Lainnya	62.700.000	51.586.500	82%	9.441.500	15%	61.028.000	97%	1.672.000	3%
	522192	Belanja Jasa Peranginan Pandemi COVID-19	960.000	600.000	63%	-	0%	600.000	63%	360.000	38%
	523111	Biaya Biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.600.000	20.589.480	100%	-	0%	20.589.480	100%	520	0%
	523121	Biaya Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	157.775.000	137.828.294	88%	16.440.626	10%	154.268.920	98%	13.506.080	9%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.538.000	95.077.390	89%	9.127.000	9%	104.204.390	98%	2.333.610	2%
	524113	Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota	30.700.000	27.970.000	91%	6.600.000	18%	33.570.000	109%	(2.870.000)	-9%
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	125.000.000	124.925.000	100%	-	0%	124.925.000	100%	75.000	0%
3	60	<b>BELANJA MODAL</b>	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	602111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
<b>J U M L A H</b>			<b>8.794.445.000</b>	<b>8.376.784.818</b>	<b>94%</b>	<b>342.271.664</b>	<b>8%</b>	<b>8.718.976.182</b>	<b>99%</b>	<b>76.488.818</b>	<b>1%</b>

MENGETAHUI / MENYETUJUI  
 KLASA PENGGUNA ANGGARAN  
 KABUPATEN GRESEK

**Bra. AHMAD FARRUDDIN, MSi**  
 NIP. 19660122 198903 1 005

Gresek, 31 Desember 2021  
 BENDAHARA PENGELOMPOK  
 KRU KABUPATEN GRESEK

**SUYANTO**  
 NIP. 19620414 200701 1 001



KPU GRESIK

